BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas non-profit yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk mencari ataupun untuk mendapatkan laba, melainkan untuk memberikan sebuah pelayanan publik kepada masyarakat. Setiap organisasi memiliki tujuan dalam organisasinya, yakni dalam suatu organisasi, kinerja dianggap sebagai aspek utama dalam mewujudkan organisasi yang dapat dikategorikan baik. Suatu organisasi harus menentukan kriteria keberhasilan agar dapat dikatakan telah mencapai tujuan (Mardiasmo, 2018).

Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, diperlukan melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator yang relevan. Pengukuran kinerja memiliki peran penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana publik yang dikeluarkan, tetapi juga memastikan bahwa pengeluarannya dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2018).

Pada penelitian ini, organisasi sektor publik yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Seluruh kegiatan perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja keuangan di setiap daerah guna menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi merupakan faktor terpenting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi, mengukur keberhasilan kinerja organisasi sektor publik serta mendukung pemerintah dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018).

Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan administrasi publik menyebabkan munculnya ketidakpuasan yang berujung pada berbagai tuntutan. Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, kinerja instansi pemerintah kini semakin menjadi sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana manfaat yang mereka terima dari layanan yang diberikan oleh pemerintah (Mahsun, 2013).

Menurut Mahsun (2013) dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk menilai kinerja para penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat. Tujuan dari pengukuran adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja tercapai dalam jangka waktu tertentu dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018), *Value for Money* adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah berdasarkan tiga faktor, yakni: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Tingkat ekonomi mengacu pada hubungan antara *input* yang digunakan dan pasar. Prinsip hemat, seperti manajemen yang hati-hati, efisiensi, dan menghindari pemborosan, sering dikaitkan dengan ekonomi. Sebuah operasi dianggap ekonomis jika dapat mengurangi biaya yang tidak perlu (Mahsun, 2013).

Tingkat efisiensi merupakan suatu pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran (*output*) yang diperoleh dengan masukan (*input*) yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Mahsun, 2013).

Tingkat efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Secara umum, efektivitas terkait dengan keberhasilan

dalam mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut Mahsun (2013), kegiatan operasional dikatakan efektif jika pelaksanaannya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dengan menerapkan konsep *Value for Money* berperan dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, memastikan bahwa layanan yang diberikan selaras dengan tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menumbuhkan kesadaran terhadap penggunaan dana publik sebagai dasar akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

Terdapat penelitian serupa dari beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan organisasi sektor publik dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Sejumlah penelitian memperoleh temuan yang berbeda pada setiap organisasi sektor publik ataupun pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Anggita Suridiyanti, Haliah, dan Nurleni (2024) mengungkapkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka pada periode 2019-2021 menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan rasio ekonomis, kinerja pemerintah daerah tergolong ekonomis. Dari segi rasio efektivitas, kinerja dikategorikan efektif. Namun, dalam hal rasio efisiensi, kinerja dinilai tidak efisien karena realisasi belanja daerah yang masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah, sehingga menyebabkan defisit. Sedangkan, pada Penelitian yang dilakukan oleh Alwin Fedianto Tameon, Sarinah Joyce Rafael, dan Linda Lomi Ga (2023) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2017-2021 menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan rasio ekonomis, kinerja pemerintah daerah tergolong cukup ekonomis, sementara rasio efisiensi menunjukkan kategori efisien, dan rasio efektivitas berada dalam kategori efektif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengelola keuangannya dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan Sitri Wahyuni, Dewi Sartika, dan Fitrah Mulyani (2022) menjelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Anggaran 2016-2020 berdasarkan rasio ekonomis berada pada kategori ekonomis, berdasarkan rasio

efisien dikategorikan tidak efisien, dan berdasarkan rasio efektivitas dikategorikan tidak efektif.

Terdapat sebuah permasalahan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, mengutip berita dari “*Kompasiana*” (www.kompasiana.com) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember seperti kebingungan dalam melakukan manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya dalam APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Jember mengalami defisit hingga 586 miliar rupiah atau setara dengan setengah triliun lebih, dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD 2021 yang tergolong sedikit, yaitu hanya sekitar 436 miliar rupiah.

Awal tahun 2021, terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh sopir truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup, karena tidak adanya kejelasan mengenai penggantian uang bahan bakar solar untuk operasional unit truk pengangkut sampah. Dan di tahun 2023, warga Kabupaten Jember dibuat kebingungan karena tidak adanya tindak lanjut terkait alat olah sampah, di mana APBD dijadikan alasan atas tidak terwujudnya alat olah sampah. Bupati Hendy Siswanto mengatakan bahwa APBD Kabupaten Jember terkuras habis untuk perbaikan infrastruktur dan penerangan jalan umum yang dinilai lebih penting dibandingkan persoalan sampah yang sepele. APBD yang terbatas mengharuskan pemerintah Kabupaten Jember perlu menilai lebih lanjut terkait mana pembangunan yang bersifat urgensi. Dari APBD yang terbatas itulah dan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada tahun 2021 inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “*Value for Money* Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan *Value for Money*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan *Value for Money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam menganalisis pengukuran kinerja keuangan pada organisasi sektor publik.